

UPAYA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENANGGULANGI BENCANA BANJIR DI KECAMATAN PELALAWAN TAHUN 2018.

Oleh : Inggit Awalia Pratiwi

Email: inggiawalia6@gmail.com

Dosen Pembimbing : Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax.
0761-63277

ABSTRACT

The problem of flooding in Pelalawan District is caused by rainfall due to the accumulated garbage and the large amount of sand deposits in the sewer so that it rains the flow of water will be hampered. Weather factors and the influence of climate change that trigger the uncertain rainy season cannot be blamed but must be addressed by the government with program planning in tackling floods. BPBD is a regional apparatus of Riau Province which was formed in order to carry out its duties and functions to carry out disaster management. The BPBD implementing element is under and the responsibility of the BPBD coconut is led by the Chief Executive who assists the BPBD Head in carrying out the duties and functions of the BPBD implementing element.

This study aims to find out how the efforts of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pelalawan Regency in Overcoming Flood Disasters in Pelalawan District in 2018 and what are the inhibiting factors for the efforts of the Pelalawan Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Overcoming Flood Disasters in Pelalawan District in 2018 2018. The research location was conducted in Pelalawan BPBD Pelalawan Regency. Furthermore, data collection techniques were carried out by interviews, documentation and literature studies.

The results of this study are the efforts of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Pelalawan Regency in Overcoming Flood Disasters in Pelalawan District in tackling flood disasters in Pelalawan District have not run optimally. This is caused by several factors such as lack of budget and lack of public awareness in littering. .

Keywords: Countermeasures, and BPBD.

PENDAHULUAN

Banjir yang sering terjadi di beberapa bagian di dunia termasuk Indonesia, merupakan peristiwa alam yang tidak dapat dicegah. Peristiwa banjir merupakan akibat dari berbagai sebab. Misalnya hujan deras dan lama serta kondisi daerah pengaliran sungai yang tidak mampu menahan air hujan, akan menimbulkan aliran permukaan yang besar. Bila palung sungai tidak mampu lagi menampung aliran permukaan yang besar, terjadilah banjir.

Faktor penyebab terjadinya banjir, diantaranya adalah:

- 1) Curah hujan pada musim penghujan, curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan banjir di sungai dan bilamana melebihi tebing sungai maka akan timbul banjir atau genangan.
- 2) Kapasitas drainase yang tidak memadai hampir semua kota-kota di Indonesia mempunyai drainase daerah genangan yang tidak memadai, sehingga kota tersebut sering menjadi sasaran musim banjir.
- 3) Sampah disiplin masyarakat untuk membuang sampah ke sungai. Di kota-kota besar hal ini sangat mudah dijumpai. Pembuangan sampah di alur sungai dapat meninggikan muka air banjir karena menghalangi aliran.
- 4) Drainase lahan drainase perkotaan dan pengembangan lahan pertanian pada daerah bantuan banjir akan mengurangi kemampuan bantaran dalam menampung debit air yang tinggi¹. Afner Son Wangka,dkk.

Di Indonesia sendiri bencana banjir hampir setiap musim terjadi. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan diatas normal dan

pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, juga pembuangan sampah kedalam sungai, dan pembangunan pemukiman didaerah dataran rendah. Penggundulan hutan di daerah tangkapan air hujan juga menyebabkan peningkatan debit banjir karena pasokan air masuk kedalam sistem aliran menjadi tinggi melampaui kapasitas pengaliran dan menjadi pemicu terjadinya erosi. Hal ini menyebabkan terjadi kekacauan terhadap sistem pengaliran air. Selain itu berkurangnya daerah resapan juga merupakan kontribusi terhadap meningkatnya debit banjir. Disamping pemahaman bencana yang bertitik tolak berdasarkan keseimbangan alam dan terdapat pemahaman yang berdasarkan keseimbangan lingkungan. Maka dari itu untuk menyikapi ancaman tersebut, Pemerintah berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.² Sebagai mana yang diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun yang disebabkan oleh faktor non alam dan faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu.

Pada tahun 2018 sejumlah wilayah di Riau dilanda banjir termasuk Kabupaten Pelalawan. Banjir yang melanda Kabupaten

¹ Rizal Wahyudha, *Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*,

(Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm 5

² ibid

Pelalawan merendam sejumlah wilayah Kecamatan yang ada. Seperti Langgam, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Pangkalan Kuras, Bunut, Teluk Meranti. BPBD Kabupaten Pelalawan mengatakan korban banjir terbanyak di Kecamatan Pelalawan Kelurahan Pelalawan 470 KK atau 3100 jiwa, Desa Sering 407 KK atau 1412 jiwa, Kuala Tolam 318 KK atau 1130 jiwa dan Sungai Ara 336 KK atau 1199 jiwa. Di Kecamatan Langgam yakni Kelurahan Langgam dengan jumlah korban 500 KK atau 1436 jiwa sedangkan di Desa Tambak, korban banjir sebanyak 30 KK atau 83 jiwa. Untuk Kecamatan Pangkalan Kerinci seperti Kerinci Kota sebanyak 95 KK atau 414 jiwa, Kerinci Barat 52 KK, Kerinci Timur 72 KK atau 200 jiwa, Rantau Baru 211 KK atau 750 jiwa, Kuala Terusan 123 KK atau 456 jiwa. Sedangkan di Kecamatan Pangkalan Kuras di Desa Kemang sebanyak 48 KK atau 189 jiwa. Untuk Kecamatan Bunut Korban Banjir di Desa Dungai Buluh sebanyak 75 KK atau 240 jiwa. Sementara Kecamatan Teluk Meranti, Desa Pangkalan Terap sebanyak 90 KK atau 340 jiwa, Desa Petodoan sebanyak 71 KK, Kuala Panduk 80 KK, Teluk Meranti 120 KK, dan Teluk Binjai 51 KK³.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang antara lain mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten /Kota dengan berpedoman pada

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai perpanjangan tangan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki tugas pokok sebagai *leading sector* dalam penanggulangan bencana, selain itu juga berperan sebagai *leading sector* dalam penyerahan bantuan dan tanggap darurat pasca bencana, seperti pemberian logistic untuk pangan serta mendirikan posko tanggap bencana mulai dari dapur umum, pos kesehatan dan lain sebagainya.

Upaya Badan Penanggulan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana banjir, yaitu : Pertama, Sosialisasi persiapan menghadapi banjir. Sosialisasi ini dilakukan untuk masyarakat Pemerintah Kabupaten Pelalawan supaya lebih tahu bagaimana persiapan menghadapi banjir di Kabupaten Pelalawan. Supaya disaat bencana banjir datang masyarakat tidak terkejut. Kedua, Tindakan pasca banjir. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang/sector lain.

Kabupaten Pelalawan yang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi terjadinya bencana, menyikapinya dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan yang diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana

³ Go Riau.com, *Korban Banjir Di Pelalawan mencapai 11.449 jiwa*, (23 Desember 2018), Akses 1 Juli 2020,

(<https://www.goriau.com/berita/baca/korban-banjir-di-pelalawan-mencapai-11449-jiwa.html>)

Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016-2021. Dalam rangka terciptanya keefektifan, efisiensi, tepat guna dan semakin berdayaguna kelembagaan pemerintah di Kabupaten Pelalawan, pada tahun 2016 dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pelalawan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pelalawan berubah nama menjadi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah Kabupaten Pelalawan yang kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Daerah berubah nama menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD.

RUMUSAN MASALAH

Sebagaimana dijelaskan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018-2019

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018!
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Upaya Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018!

KERANGKA TEORI

a. Penanggulangan Bencana

Secara garis besar, upaya penanggulangan bencana meliputi: Kesiapsiagaan keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah bencana. Penanggulangan adalah upaya untuk menanggulangi bencana, baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tujuan dari upaya di atas ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana. Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi potensi bencana yang frekuensinya terus menerus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Penanggulangan

bencana ada tiga tahap yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat. Penanganan atau penanggulangan bencana meliputi 3 fase yaitu fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai kegiatan tertentu, yang dilakukan instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan (mustopadijaja:2002:24)

Chief J.O.Udoji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *an sanctioned course of action addressed to a particular problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Pakar prancis, (Lemieux 1995:7) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: *The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time*” (produk aktivitas-aktivitas yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur . keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

(W.I.Jenkins 1978:15), merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “ *A set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concering the*

selection of goals and the means of achieving them them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para akotar tersebut).

Kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai public actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Seorang pakar mengatakan: (Aminullah dalam Muhammadi, 2001: 371 – 372): “bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli diatas, menunjukkan bahwa kebijakan publik:

1. Sebuah keputusan atau tindakan,
2. Memiliki tujuan tertentu,
3. Dan dilakukan oleh pemerintah.

c. Manajemen Bencana

Manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. (UU 24/2007).

Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing,*

actuating, dan *controlling*. Cara kerjanya meliputi pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

Manajemen bencana menurut (University British Columbia) ialah proses pembentukan atau penetapan tujuan bersama dan nilai bersama (*common value*) untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat (partisipan) untuk menyusun rencana dan menghadapi baik bencana potensial maupun aktual.

1. Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut: Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup;
2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban;
3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman;
4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana;
5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut;
6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Secara umum manajemen bencana dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan dengan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan mulai dari pra bencana, pada saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data informan penelitian dan dokumen.

Tabel 1.3
Daftar Informan Penelitian

No.	Kelompok Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
2.	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	1
3.	Sekretaris BPBD	1
4.	Pegawai BPBD	1
5.	Camat Kecamatan Pelalawan	1
6.	Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Pelalawan	1
7.	Masyarakat	8
8	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	2
9	Dinas Sosial Kab. Pelalawan	1
	Jumlah	17

Sumber data: Data Lapangan, 2019

Teknik pengumpulan data: wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisa data: metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, upaya penanggulangan bencana meliputi: Kesiapsiagaan keadaan siap setiap saat bagi setiap orang, petugas serta institusi pelayanan (termasuk pelayanan kesehatan) untuk melakukan tindakan dan cara-cara menghadapi bencana baik sebelum, sedang, maupun sesudah bencana. Penanggulangan adalah upaya untuk menanggulangi bencana,

baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk dampak kerusakan yang meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Tujuan dari upaya di atas ialah mengurangi jumlah kesakitan, risiko kecacatan dan kematian pada saat terjadi bencana; mencegah atau mengurangi risiko munculnya penyakit menular dan penyebarannya; dan mencegah atau mengurangi risiko dan mengatasi dampak kesehatan lingkungan akibat bencana. Indonesia menyadari bahwa masalah kebencanaan harus ditangani secara serius. Kebencanaan merupakan pembahasan yang sangat komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi potensi bencana yang frekuensinya terus menerus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Penanggulangan bencana ada tiga tahap yaitu pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi. Manajemen bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat. Penanganan atau penanggulangan bencana meliputi 3 fase yaitu fase sebelum terjadinya bencana, fase saat terjadinya bencana, dan fase sesudah kejadian bencana.

A. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018

Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian upaya adalah Tindakan yang dilakukan seseorang, untuk mencapai apa yang diinginkan atau merupakan sebuah strategi. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya, sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu upaya.⁴ Upaya dijelaskan sebagai usaha (syarat) suatu cara,

juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul.

Upaya Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya penanggulangan bencana banjir di kecamatan Pelalawan dan berhasil atau tidaknya tujuan BPBD yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering kali tidak memperhatikan situasi atau keadaan bawahan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efesien pelayanan, motivasi dan guna penyusunan anggaran organisasi. Tetapi persoalannya, apakah penilaian yang dilakukan telah menggambarkan kinerja sebenarnya. Hal ini akan sangat ditentukan oleh ketajaman dalam menentukan cakupan, cara dan indikator-indikator yang digunakan. Suatu penilaian yang menggunakan cakupan, cara dan indikator yang sangat terbatas akan memberikan hasil yang sangat terbatas pula dan ini berarti kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selama ini penilaian secara sistematis terhadap kinerja aparatur belum menjadi tradisi, sehingga terjadi hasil penilaian yang berbeda antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Upaya BPBD pada dasarnya merupakan factor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja BPBD secara individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat

⁴ Muhaiyat, B, (2018). *Upaya pembinaan dan pelatihan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru (Studi kasus*

di Kota Pekanbaru) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja BPBD.

Untuk penanggulangan permasalahan banjir perlu disiapkan dengan baik upaya BPBD. Terlebih dampak dari banjir ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun infrastruktur Kecamatan Pelalawan. Oleh karena itu, analisis terhadap upaya BPBD menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat sangat strategis. Informasi mengenai kinerja BPBD dan factor-faktor yang

berpengaruh terhadap kinerja BPBD sangat penting untuk diketahui, sehingga upaya pengukuran kinerja BPBD hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu upaya BPBD merupakan analisis penanggulangan bencana

banjir di Kecamatan Pelalawan. Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan dilihat dari aspek Sosialisasi Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi

Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018 dan faktor-faktor penghambat upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan, penulis akan menguraikan dan menjelaskan hal tersebut yang didukung oleh data-data

informasi yang berhasil diperoleh dari fenomena lapangan dengan melakukan wawancara, observasi yang menggunakan analisa dan Teknik triangulasi yang membandingkan data penglihatan dan data wawancara dengan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini serta membandingkan wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

B. Faktor-faktor penghambat Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam

Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018.

Beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPBD di Kabupaten Pelalawan mulai dari sumber daya manusia (SDM), minimnya anggaran untuk program penanggulangan banjir, tingginya laju pertumbuhan penduduk, sampai kurang disiplin para pegawai.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan Tahun 2018, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang bersifat mendukung dalam memperbaiki Kinerja BPBD Kabupaten Pelalawan dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Pelalawan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan dilihat dari aspek Sosialisasi Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pelalawan dalam Menanggulangi

Factor-faktor yang mempengaruhi Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kecamatan Pelalawan antara lain masalah rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD, minimnya anggaran untuk program penanggulangan banjir, tingginya laju pertumbuhan penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afner Son Wangka, dkk. *Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang di Kecamatan Pelalawan Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe*, Universitas Sam Ratulangi, 2018
- Febriza Putra, *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Banjir tahun 2017*, Universitas Riau, 2018.

Nurjanah,dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung. ALFABETA.

Rizal Wahyudha, *Implementasi Penanggulangan Bencana Banjir oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), hlm 5.

Rijanta, dkk. *Modal Sosial dalam Manajemen Bencana*. 2014. UGM.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2016.

Jurnal

Febriza Putra, “ *Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Banjir tahun 2017*”, Universitas Riau, 2018

Hasan Baseri, M. Yunus Jarnie, “*Efektivitas Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Banjar Dalam Mengurangi Resiko Bencana Banjir Di Kabupaten Banjar*”.

Nurmala Harahap, “*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pekanbaru*”, Jurnal JOM FISIP

Rizky Pandapotan Sembiring, dkk, “*Pencegahan dan Penanggulangan Banjir*”

Website

Banjir, Ongkos Jasa Penyebarangan di Lokasi Banjir Jalintim Pelalawan Capai Rp. 250 ribu. (19 Desember 2018). Akses 18 Januari 2020. (<https://pekanbaru.tribunnews.com/2018/12/19/banjir-ongkos-jasa-penyeberangan-di-lokasi-banjir-jalintim-pelalawan-capai-rp-250-ribu>).

Cakaplah.com. *2.659 KK di Pelalawan Terkena Dampak Banjir*. (20 Desember 2018). Akses 18 Januari 2020. (<https://www.cakaplah.com/berita/bac>

[a/2018/12/20/2695-kk-di-pelalawan-terkena-dampak-banjir#sthash.mVuYGLvy.dpbs](https://www.cakaplah.com/berita/baca/2018/12/20/2695-kk-di-pelalawan-terkena-dampak-banjir#sthash.mVuYGLvy.dpbs))

Go Riau.com. *Ini Rincian Data Terbaru Banjir Di Kabupaten Pelalawan 2.211 Rumah terdampak*. (23 Desember 2018). Akses 18 Januari 2020. (<https://www.goriau.com/berita/baca/ini-rincian-data-terbaru-banjir-di-kabupaten-pelalawan-2211-unit-rumah-terdampak.html>)

Go Riau.com, *Korban Banjir Di Pelalawan mencapai 11.449 jiwa*, (23 Desember 2018), Akses 1 Juli 2020, (<https://www.goriau.com/berita/baca/korban-banjir-di-pelalawan-mencapai-11449-jiwa.html>)

Riaupembaruan.com. *Dampak Banjir Di Pelalawan, Warga Terserang Dermatitis dan Ispa*. (26 Desember 2018). Akses 18 Januari 2020. (<https://riaupembaruan.com/pelalawan/Dampak-Banjir-di-Pelalawan--Warga-Terserang-Dermatitis-dan-ISPA>)Tribunpelalawan.com.